

Penguatan Kapasitas Petani Melalui Penyuluhan Studi Pada (Balai Penyuluhan Pertanian) BPP Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Intan Fransisca Fitriani¹, Irvan Nur Ridho^{2*}, Bambang Triono³, Yusuf Adam Hilman⁴

¹²³⁴Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: intanfransisca@gmail.com¹, Irvannurridho@gmail.com^{2*}, bambangtri635@gmail.com³, 545471adamongis@gmail.com⁴

ABSTRACT

Agriculture is one of the most important sectors for Indonesia's economy. The role of agricultural extension as a facilitator, motivator, and supporter of farmers' activities is central in providing guidance to farmers regarding sustainable and environmentally friendly farm management. Research to understand the strengthening of farmers' capacity through agricultural extension was conducted in a study at the Agricultural Extension Center (Balai Penyuluhan Pertanian or BPP) in Sukorejo District, Ponorogo Regency. Data collection involved observation, interviews, and documentation, with data analysis using the processes of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The BPP of Sukorejo District has shown a strong commitment to implementing agricultural extension programs with a focus on efficiency and effectiveness. Through regular monitoring and evaluation, the BPP ensures optimal use of budgets and resources and applies systematic data collection and analysis to identify areas for improvement and implement feedback from farmers and other stakeholders. Strategies such as detailed planning, rigorous evaluation, and the use of effective technology and communication methods enable the BPP to achieve maximum results with minimal costs while maintaining high-quality extension services. The Farmers' Group Association (Gapoktan) also plays a crucial role in ensuring the program's success through active monitoring, evaluation, and feedback collection, as well as conducting regular evaluation meetings with the BPP to assess the progress and effectiveness of the extension services objectively. The close collaboration between the BPP and Gapoktan in various aspects of the extension program, including monitoring, evaluation, and information dissemination, demonstrates that a comprehensive and inclusive approach can enhance transparency, accountability, and program effectiveness. With the active involvement of the farming community in every stage of planning and implementation.

Keywords : BPP Capacity, Farmers, Gapoktan, Strengthening

I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan secara geografis Indonesia berada di garis khatulistiwa dan iklim tropisnya sangat cocok untuk pengembangan pertanian. Petani dapat menyesuaikan benih mereka dengan musim. Sehingga peran pertanian juga dapat menghasilkan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang dan rumah. Tidak ada pengganti pertanian sebagai bahan pangan, sehingga pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam keadaan darurat. Sebagian besar tanah Indonesia digunakan untuk pertanian, termasuk budidaya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Karena petani menyediakan semua makanan yang dibutuhkan setiap anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, kedudukan mereka di masyarakat tidak dapat dipisahkan. Tentu saja, tanpa petani, mereka tidak akan mampu memenuhi kebutuhan makan sendiri dan bahkan harus membeli makanan dari luar negeri. Perekonomian Indonesia diprediksi akan tumbuh berkat kekayaan sumber daya alamnya (Jusuf 2022).

Salah satu tujuan Revitalisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) yang telah terbit pada tanggal 18 Oktober 2006. Berdasarkan peraturan ini, pelaku utama

pertanian harus berbentuk kelompok, konglomerasi organisasi, asosiasi, atau korporasi. Undang-Undang ini baru merupakan langkah awal dalam upaya pemberdayaan petani dan peningkatan sumber daya manusia. (Undang-Undang Nomor 16 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, 2006).

Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian amanat pasalnya tidak dijelaskan secara tegas dalam pertimbangannya, namun PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Sektor Pertanian merupakan amanat Undang-Undang Cipta Kerja tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019. Pertanian tidak akan maju jika terus menggunakan cara lama atau teknologi lama jadi pertanian membutuhkan inovasi dan teknologi baru untuk dapat meningkatkan perkembangan zaman dengan hal ini membuat teknologi pertanian akan semakin berkembang. Industri pertanian terlibat dalam pengolahan hasil pertanian atau lebih tepatnya dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah pada produk pertanian melalui penggunaan teknologi yang tepat guna. Agribisnis merupakan usaha yang berada dibidang pertanian yang mengarahkan pemikiran dan pengetahuan kepada para petani untuk mewujudkan pertanian yang unggul. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memanfaatkan sumber daya pedesaan guna menciptakan barang yang dapat bersaing, pertanian



sangatlah penting. Petani yang bekerja sama dengan perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari peningkatan akses pasar, peningkatan kualitas produk, dan kemampuan mengatasi kendala keuangan. Perusahaan juga memiliki akses ke pasokan bahan baku premium yang stabil. Kemitraan adalah kesepakatan antara berbagai pelaku industri pertanian, mulai dari tingkat produksi hingga tingkat pasar. (Aji 2012).

Salah satu sektor ekonomi terpenting di Indonesia adalah pertanian. Mayoritas penduduk Indonesia masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian, yang sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan negara. Namun, petani sering menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi hasil dan produktivitas pertanian mereka. Salah satu tantangan utama yang dihadapi petani adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik bertani yang modern dan efisien. Banyak petani masih menggunakan metode tradisional yang mungkin tidak lagi efektif atau produktif. Untuk mengatasi masalah ini, program Penyuluhan pertanian dapat menjadi solusi yang sangat membantu (Muhammad 2010). Di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) memainkan peran penting dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada petani. BPP bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi, pelatihan, dan bantuan teknis yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani. Program Penyuluhan dari BPP bertujuan untuk memperkuat kapasitas petani dengan cara yang sistematis dan terarah. Penyuluhan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik bertani yang lebih baik hingga cara mengelola sumber daya secara efisien. Dengan mendapatkan informasi yang tepat, petani dapat dengan mudah membuat sebuah keputusan yang baik berkenaan dengan praktik pertanian yang mereka pilih (Pakpahan, Wicaksono, and Hrp 2021).

Studi mengenai Penyuluhan di BPP sangat penting untuk mengevaluasi bagaimana program ini berdampak pada petani lokal. Penelitian ini dapat memberikan sebuah gambaran berkenaan dengan keunggulan maupun kelemahan pada sebuah program penyuluhan, serta area-area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian. Melalui Penyuluhan yang efektif, petani diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian mereka. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan petani, tetapi juga dapat membantu dalam mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat setempat (Halid, Imran, and Wibowo 2024).

Selain itu, peningkatan kapasitas petani juga dapat membawa manfaat yang lebih luas, seperti peningkatan ketahanan pangan di tingkat lokal dan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi daerah. Dengan hasil pertanian yang lebih baik, daerah tersebut bisa mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Penting juga untuk mencatat bahwa pelatihan dan Penyuluhan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik petani di

masing-masing daerah. Dalam hal ini, BPP perlu memahami tantangan unik yang dihadapi petani di Kecamatan Sukorejo agar program Penyuluhan dapat disesuaikan dengan situasi lokal (Manitik *et al.*, 2021)

Dengan melakukan studi mendalam tentang program Penyuluhan di BPP Kecamatan Sukorejo, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan program tersebut. Temuan dari studi ini dapat digunakan untuk merancang program Penyuluhan yang lebih efektif di masa depan. Secara keseluruhan, penguatan kapasitas petani melalui Penyuluhan adalah langkah penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Kecamatan Sukorejo. Dengan adanya penelitian ini besar harapan bisa memberi sebuah perubahan yang baik berkenaan sebuah cara melakukan perbaikan serta peningkatan program Penyuluhan pertanian di daerah tersebut (Hasugian, Sihombing, and Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian 2014)

Inti dari pemberian penyuluhan kepada petani terkait pengelolaan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan adalah fungsi penyuluhan pertanian sebagai fasilitator, motivator, dan pendukung gerakan usaha petani. Kesalahan dalam pemberian layanan penyuluhan kepada petani pada akhirnya dapat menimbulkan dampak buruk yang dapat membahayakan ekosistem. Secara umum, apabila tenaga penyuluh profesional, lembaga penyuluhan yang terpercaya, materi penyuluhan yang berkelanjutan, serta prosedur dan teknik pelaksanaan penyuluhan yang tepat telah tersedia, maka proses pelaksanaan penyuluhan pertanian dapat berjalan dengan lancar (DWP and Waridin 2015).

Penanganan sinergi dan penyuluhan yang tepat. Oleh karena itu, penyuluhan pertanian memegang peranan penting dalam memberikan akses permodalan kepada petani dan keluarganya. Dengan demikian, masyarakat dapat mandiri dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya tanpa membahayakan lingkungan (DWP and Waridin 2015). Dalam upaya penguatan kapasitas petani melalui Penyuluhan yang dilakukan oleh BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, terdapat beberapa permasalahan signifikan yang perlu diatasi. Permasalahan utama yang muncul terkait dengan keterbatasan jumlah dan kualitas Penyuluhan pertanian yang tersedia, serta anggaran yang kurang memadai, yang secara bersamaan menghambat efektivitas pelaksanaan program Penyuluhan. Keterbatasan jumlah Penyuluhan menyebabkan cakupan Penyuluhan menjadi tidak optimal, sementara kualitas Penyuluhan yang terbatas dapat mempengaruhi kualitas informasi dan bimbingan yang diberikan kepada petani. Selain itu, anggaran yang tidak mencukupi membatasi kemampuan BPP untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan Penyuluhan dan dukungan yang dibutuhkan petani,



sehingga mengurangi dampak positif dari program yang dijalankan (Septiana, 2021).

Setelah menelaah literatur, referensi merupakan langkah awal yang penting. Beberapa penelitian telah dilakukan yang relevan dengan pokok bahasan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang pertama, menurut Navis Febians (Arifin, n.d., 2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Dampak Penyuluhan Pertanian terhadap Produksi Padi di Desa Lemahbang, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Sukorejo" Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan inisiatif penyuluhan pertanian beserta dampaknya terhadap produksi padi di Desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar dampak program penyuluhan terhadap hasil produksi padi guna memahami dampak penyuluhan pertanian. Berbagai topik teknis dibahas dalam program penyuluhan yang dilaksanakan, seperti pengelolaan lahan, pemilihan varietas unggul, pemupukan, irigasi, serta pengendalian gulma dan hama tanaman (OPT). Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang hubungan antara pelaksanaan program penyuluhan dengan peningkatan hasil produksi padi serta efektivitas setiap komponen program (Halid et al. 2024)

Penelitian terdahulu yang kedua, menurut Wulandari (Teguh Prasetyo et al. 2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Pemberdayaan Petani Melalui Penguatan Kapasitas Penyuluhan Di Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima". Membahas Pelaksanaan Penyuluhan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan petani padi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan Penyuluhan di BPP Kecamatan Sukorejo belum berjalan optimal, terutama disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, tidak semua Penyuluhan berhasil menyampaikan materi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik petani padi, yang mengakibatkan informasi dan bimbingan yang diberikan tidak selalu relevan dan efektif dalam meningkatkan praktik pertanian mereka. Kedua, terdapat masalah keterbatasan personal Penyuluhan yang tidak sebanding dengan jumlah kelompok binaan yang harus mereka tangani. Kekurangan ini menyebabkan Penyuluhan menjadi kurang intensif dan kurang personal, sehingga sulit bagi Penyuluhan untuk memberikan perhatian dan dukungan yang memadai kepada setiap kelompok petani. Akibatnya, efektivitas Penyuluhan menurun dan capaian program tidak sesuai dengan yang diharapkan, menghambat upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani di daerah tersebut.

Penelitian terdahulu yang ketiga, menurut Abdul Rais (Safaruddin, Rais, and Suaedi 2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dalam Pembuatan Media Penyuluhan di Balai Penyuluhan (BPP) Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara". Dalam kegiatan penyuluhan pertanian, sebanyak tiga puluh orang dari

dua BPP, yaitu BPP Bone-Bone dan BPP Tana Lili, berhasil mengumpulkan bahan penyuluhan berupa pamflet, brosur, panplet, stiker, dan label, baik secara manual maupun digital. Mereka memanfaatkan sumber daya teknologi informasi (TI) berupa laptop yang terhubung dengan internet. Penyuluh pertanian selanjutnya memanfaatkan bahan penyuluhan ini sebagai bahan ajar dan media penyuluhan bagi kelompok tani, sehingga petani mampu menerapkan teknologi pertanian secara lebih efektif dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Penelitian terdahulu yang keempat, menurut Sucihatningsih (DWP and Waridin 2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Kapasitas Lembaga Penyuluhan Pertanian untuk Meningkatkan Kinerja Usaha Pertanian Melalui Biaya Transaksi: Sebuah Model." Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pertanian di wilayah penelitian belum mencapai efisiensi optimal dalam hal penilaian kinerja petugas penyuluhan pertanian dan perhitungan biaya transaksi yang diperlukan untuk menciptakan skenario lembaga penyuluhan. Penilaian terhadap kinerja petugas Penyuluhan mengungkapkan bahwa terdapat kelemahan dalam pelaksanaan Penyuluhan yang berdampak negatif pada hasil pertanian. Selain itu, analisis biaya transaksi diperlukan untuk merancang skenario lembaga konseling yang efektif, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani. Penelitian ini menyoroti bahwa ada peluang signifikan untuk mengoptimalkan produksi pertanian melalui pendekatan konseling yang lebih baik, yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang lebih terarah kepada petani, serta membantu mereka mengatasi tantangan yang ada dalam praktik pertanian mereka.

Penelitian terdahulu digunakan sebagai upaya para peneliti dalam mencari perbandingan dan sebagai sumber inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Kebaruan penelitian ini dengan penelitian dahulu ialah mengenai penguatan kapasitas petani melalui Penyuluhan studi pada BPP Sukorejo. Pada topik penelitian ini akan mengambil permasalahan yang akan diteliti dan dijelaskan mengenai keterbatasan jumlah dan kualitas Penyuluhan pertanian yang tersedia, serta anggaran yang kurang memadai, yang secara bersamaan menghambat efektivitas pelaksanaan program Penyuluhan.

Menurut Maulamin dkk. (2018), tata kelola perusahaan yang baik adalah seperangkat aturan dan hukum yang harus dipatuhi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan membuatnya lebih efektif dalam menciptakan nilai ekonomi dalam jangka panjang. Intinya, istilah "tata kelola yang baik" mengacu pada proses mencapai pilihan dan melaksanakannya dengan cara yang memungkinkan akuntabilitas kolektif. Cara lain untuk memahami tata kelola yang baik adalah



sebagai kesepakatan antara sektor publik, bisnis, dan pemerintah tentang cara menjalankan pemerintahan suatu negara (Supratman, 2018).

Menurut Indriana dan Nasrun (2019), tata kelola pemerintahan yang baik merupakan penerapan manajemen pembangunan yang mutlak dan bertanggung jawab yang berlandaskan pada cita-cita demokrasi, atau tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan kebijakan yang berlaku.

Tujuan tata kelola pemerintahan yang baik adalah untuk membawa prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik sehingga sektor publik dapat menjadi lebih terorganisasi. Kemampuan pemerintah untuk berfungsi bergantung pada warga negaranya yang mematuhi nilai-nilai moral yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Suatu metode untuk mengumpulkan dan menerapkan keputusan, pedoman, dan prioritas pembangunan melalui keterlibatan masyarakat merupakan pengaruh tata kelola pemerintahan yang baik (Indriana & Nasrun, 2019).

Belakangan ini, gagasan tentang tata kelola pemerintahan yang baik telah dibahas secara luas dalam berbagai latar dan telah muncul sebagai perhatian penting dalam bidang manajemen pemerintahan. Hal ini sebagian disebabkan oleh melimpahnya praktik tata kelola pemerintahan yang kuno yang tidak lagi sesuai dengan struktur sosial yang terus berkembang; dengan kata lain, pemerintah menjadi semakin tidak efektif, bahkan ketika standar demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi kebijakan publik meningkat. Selain pemberdayaan dan pembangunan, sejumlah pakar dan ahli teori administrasi berpendapat bahwa pemerintah harus memprioritaskan upaya untuk meningkatkan layanan masyarakat. Percakapan yang diadakan secara publik menghasilkan kesepakatan yang menjadi dasar bagi operasi pemerintah (Surahman & Nazaruddin, 2021).

Di sinilah ide dasar tentang kekuasaan, yakni kedaulatan rakyat, menemukan ekspresinya. Dalam situasi ini, pemerintah tidak dapat bertindak sendiri untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Sebaliknya, semua pemangku kepentingan, yakni birokrasi internal, masyarakat, dan sektor swasta, harus dilibatkan. Hanya desentralisasi dan otonomi daerah, yakni mendekatkan pemerintah dengan rakyat, yang akan mewujudkan visi tersebut. Sebagai syarat terwujudnya sistem otonomi, pemerintahan yang terdesentralisasi akan menciptakan forum demokrasi tempat masyarakat setempat dapat berpartisipasi dalam menentukan nasibnya sendiri. Forum ini akan difokuskan pada kepentingan rakyat dan akan difasilitasi oleh pemerintah daerah yang dapat diandalkan,

transparan, dan bertanggung jawab. Sebagaimana yang tercantum dalam PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Sektor Pertanian merupakan amanat dari UU Ciptaker, namun dalam pertimbangannya tidak menjelaskan secara rigid amanat pasal UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian, potensi masing-masing pemangku kepentingan dapat diaktualisasikan melalui paradigma tata kelola pemerintahan yang baik sebagai alternatif penyelenggaraan pemerintahan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan No. 22 Tahun 2019. Inovasi dan teknologi baru diperlukan dalam pertanian untuk memajukan pembangunan modern. Jika pertanian terus menggunakan metode atau teknologi kuno, pertanian tidak akan maju. Akibatnya, teknologi pertanian akan maju lebih jauh (Bonai & Lambelanova, 2023).

Dalam era otonomi daerah saat ini, sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mengutamakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tetap berpegang pada asas-asas berikut: desentralisasi, konsistensi kebijakan, pemberdayaan, daya tanggap, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, dan kepastian hukum. Paling tidak, kondisi tersebut perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang berlaku saat ini. Tentu saja sulit untuk mewujudkan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik, yang menjadi kerangka kerja tata kelola dan pembangunan, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara umum. Namun, untuk mewujudkannya, banyak pihak yang harus benar-benar bertekad (Zulkarnain & Mitrayanti, 2020).

Memahami prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang efektif sangatlah penting. Setiap prinsip yang diterapkan oleh suatu pemerintahan akan menunjukkan apakah pemerintahan tersebut menjalankan tata kelola yang baik atau buruk (Rosyada, 2016). Menurut gagasan yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2012) yang dikutip dalam Kamaluddin (2019), akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, kepatuhan terhadap aturan hukum, transparansi, efisiensi, dan efektivitas merupakan komponen dasar tata kelola pemerintahan yang baik.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan bentuk penelitian kualitatif. Pengumpulan data kualitatif melibatkan pengumpulan data tekstual atau visual. Informasi ini diambil dari dokumen resmi seperti catatan lapangan, memo, dan naskah wawancara. Melalui penggunaan suara, tulisan, dan perilaku dari mereka yang diamati, data deskriptif



tentang subjek dapat diperoleh melalui metode penelitian kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada analisis data yang disarankan dalam *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* karya Miles, Huberman, dan Saldana (2014).



Gambar 1 Tahapan Analisis Data

Sumber: (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014)

Pada awalnya, peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, teknik wawancara, dan alat perekam serta dokumen, di antara bentuk-bentuk bahan terkait penelitian lainnya. Proses ini dikenal sebagai kondensasi data. Seseorang dapat mengubah data kualitatif dengan memilih, meringkas, atau menjelaskannya dengan kata-kata sendiri. Wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi kantor BPP Kabupaten Sukorejo dan GAPOKTAN digunakan dalam metode pengumpulan data penelitian ini.

Kedua, peneliti melakukan pengumpulan data. Langkah ini juga melibatkan penyajian data secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan dinavigasi sehingga mudah diramalkan ketika diparkir. Data tersebut dapat disajikan dengan menggunakan grafik, deskripsi, bagan, dan metode lainnya. Setelah dilakukan pengumpulan data tentang Pemanfaatan Kapasitas Petani melalui Studi Penelitian di BPP (Perpetual Growth) Kabupaten Sukorejo.

Ketiga, peneliti melakukan deduksi. Proses pencatatan pola tema yang serupa, pengelompokannya, dan pencarian variasi atau varians dari kelompok lain dapat dimanfaatkan untuk membuat inferensi. Pelaporan hasil penelitian, bersama dengan penemuan lebih lanjut yang berbeda dari yang sebelumnya, dilakukan selanjutnya. Temuan penelitian disajikan dalam kesimpulan, bersama dengan informasi tentang kelompok atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam kerja sama Penyuluhan Pertanian GAPOKTAN. Data tentang Penguatan Kapasitas Petani Melalui Studi Penyuluhan di BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, disajikan (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014).

III. PEMBAHASAN

Akuntabilitas BPP Kecamatan Sukorejo, sebagai lembaga pemerintah yang menangani program penyuluhan pertanian, memiliki sistem pelaporan kinerja yang baik setiap tahunnya. Sistem pelaporan ini biasanya mencakup laporan kerja berkala tentang kegiatan yang dilakukan di lahan pertanian, penggunaan anggaran, hasil evaluasi program, dan pencapaian yang telah diraih oleh pihak BPP, dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas yang baik. Namun, akuntabilitas BPP Kecamatan Sukorejo menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga akuntabilitas program penyuluhan. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, kurangnya sistem pelaporan yang terintegrasi, serta rendahnya transparansi informasi. Selain itu, kurangnya umpan balik dari masyarakat dan tantangan dalam koordinasi antar lembaga juga menghambat akuntabilitas. Untuk mengatasi hal ini, BPP Kecamatan Sukorejo meningkatkan pelatihan bagi staf, mengembangkan sistem pelaporan kinerja, serta membangun platform untuk publikasi informasi dan umpan balik.

Selain itu, memperbarui kebijakan internal sesuai regulasi dan memperkuat komunikasi dengan lembaga terkait juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program penyuluhan. Dari wawancara dengan para ketua dan anggota gapoktan, dapat disimpulkan bahwa gapoktan memiliki tanggung jawab utama dalam mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan pertanian dengan mengikuti peraturan dan prosedur yang berlaku dari pihak BPP setempat. Setiap gapoktan, baik di Desa Karanglo Lor, Gandukepuh, Golan, maupun Morosari, memulai dengan mengikuti rencana kerja yang disetujui oleh seluruh anggota dan mencakup jadwal penyuluhan yang ditetapkan oleh BPP. Selain itu, mereka secara rutin melakukan evaluasi terhadap kegiatan pertanian untuk memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan dipenuhi.

Upaya memastikan pelaksanaan penyuluhan yang efektif, gapoktan juga menyelenggarakan pelatihan yang disediakan oleh BPP Sukorejo guna menjaga agar petani tetap terkini dengan informasi dan praktik terbaik. Proses pengambilan keputusan melibatkan anggota Gapoktan secara aktif, dan mereka menyediakan saluran umpan balik untuk mengatasi masalah atau penyimpangan yang mungkin terjadi. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa kegiatan Penyuluhan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi petani. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan dalam menjaga akuntabilitas, langkah-langkah yang diambil oleh BPP Kecamatan Sukorejo dan Gapoktan dapat membantu meningkatkan transparansi dan efektivitas program Penyuluhan pertanian. Pelatihan staf, pengembangan sistem pelaporan digital, dan



keterlibatan aktif anggota Gapoktan merupakan beberapa langkah penting untuk mencapai tujuan ini.

Partisipasi masyarakat dalam penguatan kapasitas pertanian di BPP Sukorejo sangat vital, melibatkan kontribusi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program Penyuluhan, memberikan umpan balik konstruktif, serta berpartisipasi dalam pelatihan dan evaluasi kegiatan. Hal ini memastikan bahwa program berjalan efektif dan kebutuhan masyarakat terpenuhi, yang pada akhirnya meningkatkan keberhasilan dan kapasitas pertanian secara keseluruhan. BPP Kecamatan Sukorejo mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pelatihan dan workshop Penyuluhan dengan menyusun jadwal yang fleksibel, menyediakan materi pelatihan yang relevan, menggunakan berbagai metode komunikasi untuk menginformasikan kegiatan, melibatkan petani dalam perencanaan pelatihan, dan memberikan insentif kepada petani yang aktif berpartisipasi. Upaya-upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelatihan efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan petani.

Partisipasi masyarakat dalam Gapoktan sangat penting dan melibatkan berbagai aspek utama. Anggota Gapoktan secara aktif berperan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pertanian melalui rapat dan forum diskusi yang diadakan oleh BPP setempat. Mereka berkolaborasi dengan BPP dalam pengambilan keputusan terkait program dan kegiatan, serta memberikan masukan untuk perbaikan. Selain itu, mereka juga terlibat langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari seperti perencanaan dan pelaksanaan panen, pengolahan hasil pertanian, serta pengelolaan sumber daya. Partisipasi ini memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi petani, serta meningkatkan keberhasilan dan efisiensi program pertanian.

Pelibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan, Gapoktan dapat memastikan bahwa program pertanian berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi para petani. Keterlibatan ini tidak hanya memperbaiki kualitas kegiatan pertanian tetapi juga memperkuat kesejahteraan petani secara keseluruhan. Partisipasi masyarakat dalam program Penyuluhan pertanian yang diadakan oleh BPP Kecamatan Sukorejo memiliki dampak positif yang signifikan terhadap keberhasilan dan efektivitas program tersebut. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program memungkinkan program berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta memastikan bahwa masukan konstruktif dari petani dapat diterapkan untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Upaya BPP dalam mendorong partisipasi masyarakat dengan menyusun jadwal pelatihan yang fleksibel, menyediakan materi pelatihan yang relevan, dan menggunakan berbagai metode komunikasi

menunjukkan komitmen untuk membuat program lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan petani. Pemberian insentif kepada petani yang aktif berpartisipasi juga merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Selain itu, peran aktif anggota Gapoktan dalam berbagai aspek kegiatan pertanian, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan sumber daya, menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara BPP dan petani dapat menghasilkan program yang lebih efisien dan berhasil. Partisipasi ini juga memperkuat kapasitas petani dalam mengelola kegiatan pertanian mereka sendiri, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam program Penyuluhan pertanian di BPP Kecamatan Sukorejo adalah faktor kunci dalam memastikan keberhasilan program dan peningkatan kapasitas pertanian secara berkelanjutan. Dengan terus melibatkan masyarakat secara aktif dan responsif terhadap kebutuhan mereka, BPP dapat mencapai tujuan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas program Penyuluhan pertanian.

BPP Kecamatan Sukorejo bekerja sama dengan instansi pemerintah seperti Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam program Penyuluhan. Mereka secara rutin berkoordinasi untuk menyelenggarakan program dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku, melakukan pengawasan bersama, serta menyusun dokumen dan laporan sesuai peraturan. Kolaborasi ini juga mencakup evaluasi dan audit berkala, sehingga BPP dapat memastikan bahwa kegiatan Penyuluhan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas program.

Gapoktan bekerja sama secara erat dengan BPP dan Dinas Pertanian untuk memastikan bahwa program Penyuluhan mematuhi semua aturan hukum yang berlaku. Kerja sama ini mencakup koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program, di mana Gapoktan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan pedoman dan regulasi yang ditetapkan. Selain itu, Gapoktan aktif berpartisipasi dalam rapat koordinasi dan pelaporan rutin yang diadakan oleh BPP dan pemerintah untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Melalui kolaborasi ini, Gapoktan berkontribusi dalam memastikan bahwa setiap aspek program Penyuluhan dilaksanakan dengan akurat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keterlibatan Gapoktan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan rutin menjamin bahwa semua kegiatan Penyuluhan dilakukan dengan standar hukum yang tepat, sehingga meningkatkan efektivitas program dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Kolaborasi antara BPP Kecamatan Sukorejo dengan instansi pemerintah seperti Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan sangat penting dalam



memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam program Penyuluhan. Melalui koordinasi rutin, penyaluran program dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku dapat tercapai, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program. Pengawasan bersama, penyusunan dokumen dan laporan sesuai peraturan, serta evaluasi dan audit berkala menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa kegiatan Penyuluhan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Partisipasi aktif Gapoktan dalam kerjasama dengan BPP dan Dinas Pertanian menunjukkan pentingnya keterlibatan komunitas lokal dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum. Gapoktan berperan dalam memastikan bahwa kegiatan Penyuluhan sesuai dengan pedoman dan regulasi yang ditetapkan, serta berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan rutin. Dengan demikian, Gapoktan membantu memastikan bahwa setiap aspek program Penyuluhan dilaksanakan dengan standar hukum yang tepat, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas program dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Keterlibatan Gapoktan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan rutin tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memperkuat efektivitas program Penyuluhan. Dengan berpartisipasi dalam rapat koordinasi dan pelaporan, Gapoktan membantu memantau dan memastikan bahwa kegiatan Penyuluhan dilaksanakan dengan akurat dan sesuai dengan ketentuan hukum. Kolaborasi ini memastikan bahwa program Penyuluhan tidak hanya berjalan efektif tetapi juga memenuhi standar hukum yang berlaku, yang sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang program tersebut.

Secara keseluruhan, kerjasama antara BPP Kecamatan Sukorejo, Dinas Pertanian, dan Gapoktan dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum menunjukkan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pihak terkait. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi program Penyuluhan, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan pertanian dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga meningkatkan efektivitas dan keberhasilan program secara keseluruhan. BPP Kecamatan Sukorejo memastikan transparansi informasi tentang program Penyuluhan dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti pertemuan langsung, media sosial, dan pemasangan informasi di tempat strategis. Mereka secara rutin mengadakan rapat dan workshop untuk menyampaikan informasi terkini kepada petani, serta menyediakan materi informasi yang mudah diakses seperti brosur dan poster. Langkah-langkah ini menjamin bahwa informasi mengenai program Penyuluhan tersebar luas dan dapat diakses oleh seluruh petani di Kecamatan Sukorejo.

Transparansi BPP Kecamatan Sukorejo juga memungkinkan petani memberikan masukan atau mengajukan keluhan tentang program Penyuluhan melalui berbagai saluran umpan balik, seperti kotak saran, forum diskusi, dan kontak langsung dengan petugas BPP. Transparansi dijaga dengan melibatkan petani dalam rapat evaluasi dan menyediakan laporan tindak lanjut, memastikan bahwa semua masukan ditanggapi dengan serius dan petani diinformasikan tentang tindakan yang diambil. Gapoktan memastikan transparansi dalam pelaksanaan program Penyuluhan melalui tiga langkah utama. Pertama, mereka menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan anggaran yang terbuka, memungkinkan semua anggota untuk memeriksa penggunaan dana. Kedua, BPP dilibatkan dalam penanganan masalah Penyuluhan untuk memastikan bahwa setiap masalah ditangani secara efektif. Ketiga, Gapoktan menyebarluaskan informasi materi Penyuluhan dari BPP melalui saluran komunikasi yang efektif, memberikan akses kepada petani untuk melihat dan memberikan masukan tentang materi yang disampaikan. Dengan langkah-langkah ini, Gapoktan menjaga keterbukaan dan transparansi dalam semua aspek program Penyuluhan.

Melalui sistem pelaporan yang dapat diakses anggota, keterlibatan BPP, dan penyebaran informasi yang efektif, Gapoktan memastikan bahwa program Penyuluhan dijalankan dengan akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menerima umpan balik yang konstruktif dari petani. Upaya BPP Kecamatan Sukorejo dalam memastikan transparansi informasi program Penyuluhan mencakup penggunaan berbagai saluran komunikasi yang efektif. Pertemuan langsung, media sosial, dan pemasangan informasi di tempat strategis memungkinkan informasi tersebar luas dan mudah diakses oleh petani. Rapat dan workshop rutin, serta penyediaan materi informasi seperti brosur dan poster, juga menjadi langkah penting dalam menjamin keterbukaan informasi.

Kemampuan petani untuk memberikan masukan atau mengajukan keluhan melalui berbagai saluran umpan balik menunjukkan komitmen BPP Sukorejo terhadap transparansi. Dengan melibatkan petani dalam rapat evaluasi dan menyediakan laporan tindak lanjut, BPP memastikan bahwa setiap masukan ditanggapi dengan serius dan tindakan yang diambil diinformasikan kepada petani. Langkah ini tidak hanya memperkuat hubungan antara BPP dan petani tetapi juga meningkatkan akuntabilitas program Penyuluhan. Gapoktan memainkan peran penting dalam menjaga transparansi program Penyuluhan dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan anggaran yang terbuka. Hal ini memungkinkan anggota memeriksa penggunaan dana, yang merupakan langkah penting dalam memastikan akuntabilitas keuangan. Keterlibatan BPP dalam penanganan masalah Penyuluhan memastikan



bahwa setiap masalah ditangani secara efektif, sementara penyebaran informasi materi Penyuluhan melalui saluran komunikasi yang efektif memberikan akses kepada petani untuk memahami dan memberikan masukan tentang materi yang disampaikan.

Dengan melibatkan anggota Gapoktan dalam sistem pelaporan yang dapat diakses, serta menyebarluaskan informasi dengan cara yang efektif, Gapoktan memastikan bahwa program Penyuluhan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Partisipasi aktif petani dalam memberikan umpan balik konstruktif juga menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya tentang penyebaran informasi tetapi juga tentang mendengarkan dan merespons kebutuhan serta masukan dari masyarakat. Secara keseluruhan, transparansi yang diterapkan oleh BPP Kecamatan Sukorejo dan Gapoktan dalam program Penyuluhan pertanian menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan inklusif. Dengan memastikan bahwa informasi tersebar luas dan mudah diakses, serta membuka saluran umpan balik yang efektif, mereka dapat meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan keberhasilan program Penyuluhan pertanian di Kecamatan Sukorejo.

Efisiensi dan efektivitas BPP Kecamatan Sukorejo dalam mengukur penggunaan sumber daya dalam program Penyuluhan dilakukan melalui beberapa cara. Efektivitas BPP diukur dengan pemantauan dan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa anggaran dan sumber daya digunakan secara optimal. Data tentang pelaksanaan program, termasuk jumlah petani dan dampak Penyuluhan, dikumpulkan dan dianalisis untuk menilai efektivitas penggunaan sumber daya. Evaluasi berkala yang melibatkan petani dan pihak terkait juga dilakukan untuk mendapatkan umpan balik, sehingga BPP dapat mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan sumber daya digunakan secara efektif untuk meningkatkan kapasitas petani.

BPP Kecamatan Sukorejo mengoptimalkan hasil program Penyuluhan dengan biaya minimal melalui beberapa langkah strategis. Pertama, mereka merencanakan secara detail untuk memastikan anggaran digunakan secara efisien dan sesuai kebutuhan. Kedua, BPP menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan meminimalkan pemborosan. Ketiga, pemanfaatan teknologi dan metode komunikasi yang efektif membantu mengurangi biaya operasional tanpa mengurangi kualitas Penyuluhan. Pendekatan ini memungkinkan BPP mencapai hasil maksimal dalam program Penyuluhan sambil menjaga efisiensi biaya. Gapoktan melakukan pemantauan dan evaluasi hasil Penyuluhan BPP dengan cara yang sistematis. Mereka rutin mengamati pelaksanaan kegiatan dan mengumpulkan umpan balik langsung dari petani lain untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai penerapan materi Penyuluhan. Melalui proses ini,

Gapoktan dapat memahami secara mendalam bagaimana materi Penyuluhan diterima dan diterapkan di lapangan. Selain itu, Gapoktan dan BPP secara berkala mengadakan rapat evaluasi untuk menilai efektivitas program. Dalam rapat ini, mereka membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan awal program, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Evaluasi yang dilakukan secara berkala ini memungkinkan mereka untuk secara objektif menilai kemajuan dan keberhasilan Penyuluhan.

Efisiensi dan efektivitas program Penyuluhan di BPP Kecamatan Sukorejo sangat ditentukan oleh sistem pemantauan dan evaluasi yang diterapkan. BPP melakukan pemantauan dan evaluasi rutin untuk memastikan anggaran dan sumber daya digunakan dengan optimal. Pengumpulan dan analisis data tentang pelaksanaan program memungkinkan BPP menilai efektivitas penggunaan sumber daya dan mengidentifikasi area perbaikan. Keterlibatan petani dan pihak terkait dalam evaluasi berkala juga memastikan bahwa umpan balik yang diterima relevan dan bermanfaat untuk peningkatan program.

Langkah-langkah strategis yang diambil oleh BPP Sukorejo untuk mengoptimalkan hasil program Penyuluhan dengan biaya minimal menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan terencana. Perencanaan detail, sistem pemantauan dan evaluasi yang ketat, serta pemanfaatan teknologi dan metode komunikasi yang efektif memungkinkan BPP mencapai hasil maksimal dengan biaya yang efisien. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi biaya operasional tetapi juga memastikan bahwa kualitas Penyuluhan tetap terjaga. Gapoktan memainkan peran penting dalam pemantauan dan evaluasi hasil Penyuluhan BPP. Dengan mengamati pelaksanaan kegiatan dan mengumpulkan umpan balik langsung dari petani, Gapoktan dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai penerapan materi Penyuluhan di lapangan. Rapat evaluasi berkala antara Gapoktan dan BPP memungkinkan mereka membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan awal program dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Evaluasi yang dilakukan secara sistematis ini memastikan bahwa manfaat dari Penyuluhan sesuai dengan harapan dan kebutuhan petani.

Secara keseluruhan, sistem pemantauan dan evaluasi yang diterapkan oleh BPP Kecamatan Sukorejo dan Gapoktan menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan sistematis dalam mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam program Penyuluhan. Dengan langkah-langkah ini, BPP dapat memperbaiki area yang memerlukan perhatian dan memastikan bahwa program Penyuluhan memberikan hasil yang optimal bagi petani. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tetapi juga memastikan bahwa program Penyuluhan dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien.



IV. KESIMPULAN

BPP Kecamatan Sukorejo telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program Penyuluhan pertanian. Melalui pemantauan dan evaluasi rutin, BPP mampu memastikan penggunaan anggaran dan sumber daya yang optimal. Pengumpulan dan analisis data secara sistematis memungkinkan identifikasi area perbaikan yang relevan, serta penerapan umpan balik dari petani dan pihak terkait, sehingga program penyuluhan dapat terus ditingkatkan sesuai kebutuhan di lapangan. Langkah-langkah strategis yang diterapkan, seperti perencanaan yang detail, sistem evaluasi yang ketat, serta pemanfaatan teknologi dan metode komunikasi yang efektif, telah membantu BPP Sukorejo mencapai hasil maksimal dengan biaya minimal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya operasional tetapi juga memastikan bahwa kualitas penyuluhan tetap terjaga.

Gapoktan juga memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan program Penyuluhan melalui pemantauan dan evaluasi yang sistematis. Keterlibatan aktif gapoktan dalam pengumpulan umpan balik dan pelaksanaan rapat evaluasi berkala bersama BPP membantu dalam menilai kemajuan dan keberhasilan penyuluhan secara objektif. Partisipasi ini memastikan bahwa materi penyuluhan diterima dan diterapkan dengan baik oleh petani, serta bahwa standar yang ditetapkan dapat dipenuhi. Kolaborasi antara BPP dan gapoktan dalam berbagai aspek program penyuluhan, termasuk dalam pemantauan, evaluasi, serta penyebaran informasi, menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif dan inklusif dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program penyuluhan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat petani dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan, BPP dapat memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Secara keseluruhan, upaya BPP Kecamatan Sukorejo dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas program penyuluhan pertanian telah membuahkan hasil yang positif. Langkah-langkah strategis yang diambil, serta kolaborasi yang erat dengan Gapoktan, telah membantu memastikan bahwa program penyuluhan dilaksanakan dengan cara yang efektif, efisien, dan transparan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keberhasilan program tetapi juga memperkuat kapasitas petani, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, Studi dan. 2012. *Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta*.

Arifin, Zainul. n.d. "Pengaruh Penyuluhan Pertanian Terhadap Produksi Padi Abstrak." 1–8.

BNPB. 2007. "Undang Undang Republik Indonesia Tentang." *Bnpb.Go.Id* 12y(235):245.

DWP, Sucihatningsih, and Waridin Waridin. 2015. "Model Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian Dalam Meningkatkan Kinerja Usahatani Melalui Transaction Cost Studi Empiris Di Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan* 11(1):13. doi: 10.23917/jep.v11i1.332.

Halid, Cindri A., Supriyo Imran, and Larasati Sukmadewi Wibowo. 2024. "Evaluasi Program Penyuluhan Sistem Tanam Padi Jajar Legowo Terhadap Produksi Dan Pendapatan Di Desa Dutohe Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango." *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 8(1):139. doi: 10.21776/ub.jepa.2024.008.01.11.

Hasugian, Holong, Luhut Sihombing, and Alumni Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian. 2014. "Performance Evaluation of Agricultural Extension Center (Aec) Pakpak Bharat." *Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics* 3(1):1–12.

Jusuf. 2022. *Perancangan Aplikasi Penjualan Hasil Panen Di Indonesia Berbasis Android. Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*.

Manitik, Englin Ferlina, Burhanuddin Kiyai, And Joorie. .. Ruru. 2021. "Kapasitas Kelompok Tani Di Desa Uuwan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Englin." *Partisipasi Masyarakat Pada Pencegahan Dan Penanggulangan Virus Corona Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kotamanado VII(102):43–52*.

Muhammad, Dalina. 2010. "No Title Детская Неврология." *Ekp* 13(3):576.

Pakpahan, Tience Elizabet, Makruf Wicaksono, and Qorimah Handari Hrp. 2021. "Peran Balai Penyuluhan Pertanian Sebagai Pusat Data Informasi Pertanian Dalam Mendukung Program Kostratani." *Jurnal Agribisnis Terpadu* 14(1):46. doi: 10.33512/jat.v14i1.11458.



Safaruddin, Abdul Rais, and Suaedi. 2022. "Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Dalam Pembuatan Media Penyuluhan Di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Pendahuluan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (ABDIMAS LANGKANA)* 2(1):49–55.

Septiana, Septiana. 2021. "Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Melalui Pendampingan Pembenahan Administrasi Dikawasan Food Estate Provinsi Kalimantan Tengah." *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan* 1(2):107–14. doi: 10.51878/manajerial.v1i2.549.

Teguh Prasetyo, Dimas, Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, Fitra Hasri Rosandi, Efan Yudha Winata, and Pratiwi Sakti. 2020. "Prosiding Seminar Nasional IPPeMas 2020 Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Menunjang Era Industri 4.0 Lihat-Dengar-Hubungkan: Efektivitas Program Dukungan Psikologis Awal Untuk Generasi Milenial." 303–8.

